



Art Center,

Investasi Kultural Masyarakat Bali

ART Center sejatinya berkontribusi penting terhadap perkembangan kebudayaan Bali. Apalagi sejak 37 tahun silam, Art Center telah dimanfaatkan sebagai lokasi utama event Pesta Kesenian Bali (PKB). Seniman Kadek Suartaya bahkan menyebut Art Center sebagai investasi kultural masyarakat Bali, yang memiliki arti penting di tengah era globalisasi saat ini.

"Ada sesuatu yang sifatnya terpusat, di mana sebelumnya kesenian-kesenian Bali itu sifatnya hanya lokal-lokal saja di masing-masing daerah, kabupaten, desa," ujar Suartaya, Jumat (27/3) kemarin.

Menurutnya, melalui Art Center masyarakat Bali bisa mengenal seni, keseniannya, serta menyaksikan berbagai macam pentas. "Mungkin kalau



tidak ada Art Center, kemudian diadakannya PKB, di sana itu keadaannya tidak seperti sekarang perkembangan kesenian Bali. Ini kontribusi Art Center, sudah memberikan wadah yang luar biasa terhadap kebudayaan Bali dan membentuk jati diri orang Bali," imbuhnya.

Dosen ISI Denpasar ini menambahkan, seni dan budaya Bali akan tetap hidup sepanjang agama Hindu masih ada. Namun saat ini, PKB sudah mulai tergerus dari tujuan awalnya untuk menggali, membina, mengembangkan, dan melestarikan seni budaya Bali. Pasalnya, PKB saat ini cenderung menampilkan aktivitas ekonomi ketimbang pertunjukan seni.

Hal. 27

Faktor Ekonomi



Bali post/dok

SENI - Salah satu pementasan seni di Art Center Denpasar. Keberadaan Art Center merupakan investasi kultural masyarakat Bali.



Sambungan

Faktor Ekonomi

Dari Hal. 1

"Saya setuju faktor ekonomi itu memang perlu digarap, tetapi tidak di sana tempatnya. Itu tempat investasi kultural, investasi budaya yang tidak akan bisa dibeli di zaman global sekarang. Justru orang mencari-cari di dunia, di Jepang, di Amerika, yang saya tahu itu seorang mencari identitas dirinya dengan kebudayaan, dengan seni. Ekonomi silakan di tempat lain," jelasnya.

Sementara itu, Dosen Fotografi ISI Denpasar Alit Widusaka berpendapat, Art Center sebaiknya dikelola secara profesional. Alit mengkritik kinerja pemerintah yang serba tanggung dalam mengelola Taman Budaya ini. Belum lagi para pejabatnya ada yang tersangkut kasus korupsi. "Artinya, harus profesional. Art Center kan hidup bulan Juni-Juli saja pas PKB. Setelah itu enggak jelas, paling disewa untuk perkawinan, seminar. Ksiramawa sekarang menjadi tempat elite sekali. Pentas musik enggak boleh, supermewah. Seharusnya Art Center menjadi gedung pertunjukan yang merakyat," ujarnya.

Alit juga menyayangkan harga sewa gedung-gedung di Art Center terkadang sangat

mahal. Padahal, pemerintah seharusnya bisa memberi subsidi. Belum lagi adanya sejumlah pungutan tidak jelas untuk alasan keamanan atau kebersihan, bila ingin meminjam lokasi untuk keperluan foto. Namun, bukan berarti hal ini harus disikapi dengan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta atau Perusahaan Daerah (Perusda) Bali. "Jangan nanti baru swasta, nanti kemahalan lagi, kan itu yang kita enggak senang. Saya takutnya itu, baru dikasi swasta malah harga sewanya tinggi lagi, malah enggak bener. Boleh pemerintah, tetapi yang profesional. Ada pementasan, enggak ada pementasan, yang penting *cost* listrik, kebersihannya cocok, kan mestinya itu saja pengelolaan Taman Budaya. Enggak perlu mereka cari untung, toh juga mereka itu sudah digaji," jelasnya.

Sebelumnya (BP, 26/3), Direktur Teknis Akuisisi Perusda Bali I Wayan Tana membenarkan adanya rencana Perusda memohon untuk diberikan mengelola Art Center. Tana menjamin bila pengelolaan Art Center diserahkan kepada Perusda, maka hal ini tidak akan mematikan seniman. Sebaliknya, keuntungan yang nantinya diperoleh justru akan digunakan untuk

menghidupkan seniman sebagai roh dari Art Center itu sendiri.

Kepala Dinas Kebudayaan Bali Dewa Putu Beratha membenarkan bila Perusda mengajukan permohonan untuk mengoptimalkan pendapatan Art Center. Namun realisasinya dikatakan masih jauh lantaran pihaknya masih melakukan pengkajian. Utamanya dari segi peraturan perundang-undangan, apakah memungkinkan bagi Perusda untuk ikut mengelola Art center.

"Yang jelas bukan jadi perusahaan daerah, artinya perusahaan daerah mengajukan permohonan untuk bisa ikut mengoptimalkan Taman Budaya dari segi pendapatan. Cuma masalahnya kan harus jelas, apanya yang dikelola, itu yang masih perlu kita kaji," ujarnya.

Terlebih, lanjut Beratha, pemanfaatan gedung dan ruang-ruang di Art Center termasuk penyewaannya sudah diatur dalam peraturan gubernur. Oleh karena itu, pihaknya mengaku sangat berhati-hati agar pengoptimalan pendapatan yang diajukan Perusda tidak memberatkan para seniman nantinya. Termasuk tidak mengganggu fungsi Taman Budaya sebagai pusat pengembangan dan pelestarian seni budaya. (rin)

hal. 2

Edisi : Sabtu, 28 Maret 2015

Hal : 1 dan 27



Bupati

Dana Talangan KUD Bukan untuk Simpan-Pinjam



Bupati I Putu Artha

Negara (Bali Post) -

Kritikan terkait kinerja KUD dari kalangan DPRD mendapat tanggapan Bupati I Putu Artha. Bupati sepakat perlu adanya penguatan dan pengembalian fungsi KUD yang belakangan sudah beralih dari fungsi awalnya. Bupati mengatakan selama ini Pemkab tetap menganggarkan dana talangan bagi sejumlah KUD senilai Rp 5 miliar guna membeli gabah petani. Namun dana itu untuk antisipasi ketika harga gabah anjlok saat panen raya.

"Tetapi dana itu harus dibarengi dengan komitmen para pelaku untuk membantu petani saat panen raya, agar tidak terjadi masalah (harga anjlok)," terangnya, Jumat kemarin. Karena itu dana tersebut diberikan saat panen raya antara bulan April dan Mei. Pemkab enggan mencairkan awal ke KUD, khawatir dana itu tidak dimanfaatkan dengan benar. "Dana itu kan untuk membeli gabah petani, bukan untuk simpan pinjam," tandas Artha.

Kendati demikian, petani seringkali mengeluh saat panen ketika menyerahkan gabah ke KUD, dikatakan gudang penuh, lantai jemur terbatas hingga alasan kaping habis. Kalau saja memang KUD punya



Sambungan

iktikad, hal itu bisa terpenuhi. Apalagi, akan ada program baru dari pemerintah pusat menggelontorkan pupuk dan bibit lewat KUD. Kalau KUD tidak diperbaiki dan tidak ada niat membantu petani justru akan berorientasi bisnis. "Dikatakan pupuknya habis, bibit habis. Lalu ada pengurus yang punya toko, diarahkan membeli ke sana," tambahnya.

Menurutnya, dana talangan itu harus dimanfaatkan sesuai kebijakan, untuk melindungi petani dari anjloknya harga gabah saat panen raya. Bupati bahkan sempat hendak menghapus dana talangan itu, lantaran ternyata belum langsung dirasakan petani. Justru yang terpenting adalah penguatan KUD saat ini, bagaimana mereka bisa memberdayakan yang ada. Apalagi selama ini Bupati juga tidak pernah mendapatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana talangan itu walaupun setiap akhir tahun sudah ada

pengembalian.

"Harus dibuatkan pertanggungjawaban. Subak mana saja beligabah, ditampung ke mana. Sampai saat ini saya tidak pernah mendapatkan, mungkin sudah melaporkan tapi ke mana," tambahnya. Dana talangan dengan bunga nol persen bersumber dari APBD itu menurutnya kapanpun bisa dicairkan. Namun Bupati berharap agar dana tersebut dimanfaatkan dengan baik. Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD I Ketut Sugiasa meminta agar roh KUD dikembalikan untuk kepentingan petani.

Selama ini, terjadi pergeseran fungsi KUD, bahkan para petani yang menjadi anggota terpinggirkan. Pengurus juga bukan dari kalangan petani, bahkan dana talangan justru digunakan untuk simpan pinjam di luar anggota. Hal ini justru melemahkan fungsi KUD yang dari awal memang untuk menyejahterakan petani. (kmb26)

hal. 2

Edisi : Sabtu, 28 Maret 2015

Hal : 17



Dirancang Badan Pengelola Besakih

Pemkab Minta Bagian 58 Persen, Desa 42 Persen

Amlapura (Bali Post) -

Pemkab Karangasem berencana membentuk badan pengelola (BP) untuk mengelola objek daya tarik wisata (ODTW) Besakih. Dalam rancangan yang diajukan ke dewan, Pemkab Karangasem minta bagian 58 persen dan pihak Desa Besakih diberi 42 persen. Hal itu disampaikan Kadisbudpar Karangasem Drs. Wayan Purna, Jumat (27/3) kemarin di Karangasem. Rancangan ini berbeda dengan yang diajukan pihak Desa Besakih. Rancangan pembagian hasil bersih pendapatan Pemkab Karangasem 55 persen dan pihak Besakih minta 45 persen. "Itu masih rancangan yang dibuat masing-masing. Tentunya kedua rancangan akan dirembukkan kembali, guna bisa tercapai kesepakatan," kata Purna.

Dia mengatakan, ODTW Besakih selama ini belum dikelola dengan BP. ODTW Besakih banyak dikeluhkan pramuwisata dan wisatawan lewat media sosial atau internet. Sebelumnya telah dibentuk tim penataan ODTW Besakih dengan ketuanya Camat Rendang. Namun masih saja ada protes yang tak mengenakan dari pengunjung karena diperlakukan tak mengenakan perasaan. Seperti diperas atau ditipu. Hal ini dikhawatirkan bakal merusak citra ODTW Besakih. Bahkan dikhawatirkan bisa mendegra-

ucian pura kahyangan jagat itu. Karena itu, lanjut Purna, banyak pihak mewacanakan agar ODTW itu dikelola BP, seperti ODTW Tanah Lot.

Dari hasil studi banding Disparsenibud Karangasem melibatkan pihak desa Besaki, dan pihak terkait, semuanya sepakat ODTW Besakih agar diran-dikel-juru sakih setuju kar-e n a diun-

tungkan. Apalagi selama ini dari pengelolaan ODTW itu tidak mendapatkan bagian langsung dari retribusi yang masuk. Namun memang sudah mendapatkan ADD, serta pihak desa pakraman Besakih juga mendapatkan bantuan sosial dari PHR Badung. "Pihak Besakih sudah setuju ODTW Besakih dikelola BP," katanya.

Nantinya BP itu dia-

c a n g
o l a B P .
p r a -
d i B e -
j u g a



Sambungan

tur dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Ketua BP Bupati sendiri dan ditunjuk ketua operasional. Sementara, pembagian pendapatan dengan persentase yang disepakati, setelah dipotong biaya operasional.

Keuntungan nantinya diharapkan setelah dikelola BP, pengelolaan menjadi lebih profesional. Pihak desa mendapatkan pembagian dari hasil pemasukan retribusi dan parkir sesuai kesepakatan dan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk operasional. Diharapkan dengan dikelola BP, Besakih menjadi lebih tertata. Tak seperti selama ini, pedagang sampai merangksek sampai ke bagian hulu pura, yang seharusnya dijaga sebagai kawasan suci. Nantinya diharapkan tak ada pedagang acung merangsek sampai ke hulu pura. Bahkan, diharapkan tak ada tu-

kang ojek, tukang penyewaan payung yang menipu atau orang menyewakan selendang sembarangan.

Dari pengelolaan retribusi karcis masuk di ODTW Besakih selama ini, pendapatan Pemkab berkisar Rp 1,1 miliar sampai Rp 1,2 miliar per tahun. Target ke depan akan ditingkatkan, kalau sudah dikelola BP. Nantinya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dirancang menjadi andalan. Selama ini andalan PAD dari galian C yang merupakan sumber daya alam tambang yang tak bisa diperbarui dan cenderung merusak lingkungan.

Dari hasil studi banding ke BP Tanah Lot, pendapatan jauh melonjak dan menguntungkan setelah OTDW itu dikelola BP dibandingkan sebelumnya. "Dari ODTW Tanah Lot, Desa Beraban per tahun bersih dapat bagian Rp 9 miliar. Total pendapatan BP Tanah Lot Rp 50 M per tahun," katanya. (013)



DIIZINKAN - Wisman kerap diizinkan masuk sampai ke jeroan Pura Besakih.

Bali Post/bud

hal 2

Edisi : Sabtu, 28 Maret 2015

Hal : 12

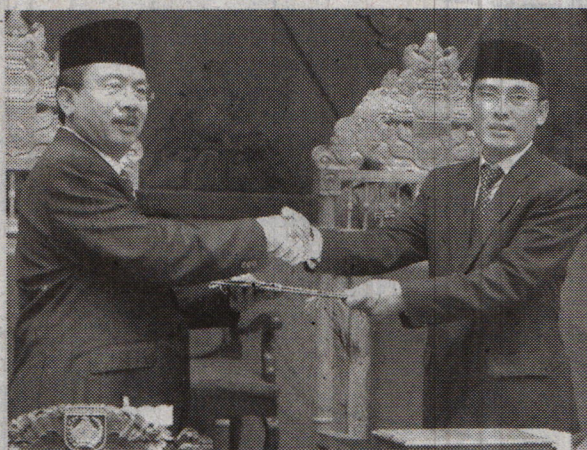


DPRD Karangasem Serahkan Rekomendasi Strategis LKPJ

KETUA DPRD Karangasem Nengah Sumardi, S.E., M.Si. dalam sidang paripurna Dewan, Jumat (27/3) kemarin, menyerahkan rekomendasi strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Karangasem akhir masa jabatan 2010-2015. Saat itu salah satu yang disoroti Dewan yakni selama ini dari hasil audit BPK RI, pengelolaan keuangan belum pernah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Karena itu, guna mencapai WTP pengelolaan anggaran tahun berikutnya, lebih ditingkatkan kualitasnya. Peraturan pengelolaan anggaran mesti dipatuhi. Penjabaran anggaran sampai ke kebijakan umum anggaran (KUA) sampai ke rancangan APBD, seterusnya menjadi program agar konsisten.

Pada keputusan DPRD yang dibacakan anggota Dewan Ketut Badra, juga disampaikan rekomendasi agar pengelolaan APBD ke depan oleh eksekutif mencerminkan prinsip hemat, efektif dan efisien. Persentase anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan sudah melampaui batas minimal yang ditetapkan pemerintah pusat, ke depan agar dipertahankan, bila perlu ditingkatkan terutama lebih banyak untuk belanja modal. "Defisit anggaran sudah tak melewati batas maksimal yang ditentukan peraturan. Itu perlu dipertahankan. Penempatan program dan kegiatan dalam APBD



REKOMENDASI - Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi (kanan) menyerahkan rekomendasi strategis Dewan terhadap laporan keterangan akhir masa jabatan Bupati Wayan Geredeg.

agar tepat sasaran," kata Badra.

Pemerintah diharapkan ke depan mampu meningkatkan alokasi anggaran untuk program pada sektor real, belanja modal yang lebih fokus menyentuh kepentingan masyarakat seperti pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan, pengadaan air bersih, irigasi lahan pertanian yang selama ini kerap krisis irigasi pertanian.

Menurut pihak DPRD Karangasem, pihak Pemkab Karangasem sebenarnya masih memiliki peluang cukup banyak untuk menggali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan terutama membuka peluang-peluang pendapatan yang diatur perda. "Perlu jemput bola terhadap pengusaha atau investor galian C yang belum memiliki

izin, agar mereka mengurus izinnya, sehingga Pemkab mendapatkan pemasukan dari pengurusan izin. Selama ini juga banyak indikasi kebocoran pajak atau retribusi, perlu diintensifkan penagihan dan pengawasannya.

Belanja daerah memang sudah terus meningkat, bahkan belanja selalu lebih besar dari pendapatan daerah sehingga terjadi defisit minus. Belanja dirancang seperti itu karena akan ditutupi dengan pembiayaan lebih tahun sebelumnya, sehingga tak terjadi utang.

Di lain pihak, Bupati Wayan Geredeg mengatakan, catatan strategis dewan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban masa akhir jabatan Bupati 2010-

2015 sangat positif. Hal itu akan menjadi referensi bagi eksekutif tahun berikutnya dan dijadikan pedoman dalam pengelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selanjutnya di Karangasem.

Saat itu, Bupati Geredeg juga menyerahkan dua Ranperda untuk dibahas dan disahkan Dewan yakni Ranperda Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel, serta Ranperda tentang Hari Jadi Kota Amlapura. Dalam Ranperda terakhir itu, diajukan Hari Jadi Kota Amlapura pada 22 Juni 1611. Hal itu hasil seminar yang membahas penelusuran terhadap sejarah masa lampau sampai munculnya Kota Amlapura. (ad1)



Perbaikan Infrastruktur Baru Tahap Survei HPS

Semarapura (Bali Post) -

Proses perbaikan jalan di Kecamatan Nusa Penida tahun ini mulai dipertanyakan masyarakat setempat. Pasalnya, hingga saat ini belum ada aktivitas perbaikan infrastruktur. Saat ini, prosesnya sudah masuk dalam rencana umum pengadaan (RUP) dan saat ini sedang dalam tahap survei harga perkiraan sendiri (HPS). Demikian dijelaskan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ketut Suayadnya, Jumat (27/3) kemarin. "Rencana perbaikan infrastruktur masih dalam proses. Warga Nusa Penida saya harap bersabar," ujarnya.

Ia mengatakan setelah HPS baru disusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk melengkapi dokumen sebelum diserahkan ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) untuk proses tender. "Kami tak ingin proyek ini gagal tender. Sebab, hal itu akan mengganggu proses tahapan perbaikan jalan yang sudah dirancang pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya. Ia belum bisa memperkirakan, kapan pekerjaan fisik perbaikan jalan bisa dilakukan.

Ia memperkirakan, April-Mei dokumen sudah sampai ke ULP. Ia mengatakan Pemerintah Daerah berkomitmen agar perbaikan akses jalan tidak sampai gagal tender yang dapat menghambat proses tahapan perbaikan akses jalan. Ketut Suayadnya mengaku sangat memahami apa yang dirasakan masyarakat Nusa Penida saat ini. Eksekutif, sesuai arahan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, tahun ini sudah berupaya keras agar ada perbaikan infrastruktur jalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini Pemkab sudah menganggarkan perbaikan infrastruktur jalan sebesar Rp 28 miliar, anggaran yang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan anggaran sebesar itu fokus perbaikan jalan sementara lebih kepada jalan-jalan protokol perkotaan, seperti dari Suana menuju Toya Pakeh dan Lembongan-Jungut Batu. Ia mengakui dengan anggaran sebesar itu belum bisa mengatasi seluruh kerusakan jalan di Kecamatan Nusa Penida.

Data terakhir Dinas Pekerjaan Umum (PU) memperlihatkan ratusan kilometer akses jalan kabupaten mengalami rusak berat. Kerusakan terparah terjadi di Nusa Penida. Kabupaten Klungkung memiliki panjang jalan 492 kilometer. Antara lain, di Kecamatan Banjarangkan 86,375 kilometer, Klungkung 102,835 kilometer, Dawan 65,710 kilometer dan Nusa Penida 238 kilometer. Total dari tiga kecamatan di Klungkung daratan, terdapat akses jalan sepanjang 254 kilometer. Dari data itu, 15 persen jalan di antaranya masih rusak. Sementara di Nusa Penida, dari panjang 238 kilometer kerusakan jalan mencapai 70 persen. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta pernah mengutarakan dari analisis kasar pemerintah daerah, perbaikan seluruh akses jalan yang rusak di Kecamatan Nusa Penida menghabiskan anggaran Rp 123 miliar. (kmb31)

Edisi : Sabtu, 28 Maret 2015

Hal : 20